



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3908476, 3902466, FAKSIMILE (021) 3902449

Nomor : S/107/SIMNAS/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Enam Berkas
Perihal : Undangan Simposium Nasional/Bimtek

Jakarta, 08 November 2023

Kepada Yth,-
Bupati Kabupaten Indragiri Hilir
Di,-

T e m p a t .-

Dalam rangka optimalisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU-PPK) serta kebijakan yang telah dibuat untuk optimalisasi dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Survei Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawasan Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerja sama sebagai mitra negara dalam rumpun eksekutif yang dapat melaksanakan tugas yang bersifat independen dan semi-independen bertugas untuk memberantas korupsi. Di era yang semakin digital ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang dinamis, mampu bekerja dengan cepat, tepat, akurat, efektif, dan efisien dengan mengedepankan tingkat pelayanan yang cepat dan murah dalam rangka meningkatkan kepentingan masyarakat (*Good Governance*) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar dan bersih. Pelaksanaan rencana aksi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan RPJMD, yaitu dengan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) yang merupakan terintegrasi untuk memudahkan *monitoring* dalam upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. MCP merupakan sistem dalam upaya mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan pemenuhan target pada indikator yang sudah ditetapkan terkait pencegahan korupsi melalui sistem MCP yang bertujuan untuk mengevaluasi progres perubahan/capaian pada 8 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas APIP, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Sektor perencanaan dan penganggaran APBD menjadi salah satu fokus dalam pencegahan korupsi terintegrasi, mengingat terkait dengan keuangan daerah karena beberapa titik rawan dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah, antara lain titik rawan korupsi berupa *fee* proyek atau ijin proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah, dan lainnya. Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) merupakan sektor strategis dan juga terkait dengan keuangan daerah. Dari hasil identifikasi sektor pengadaan barang dan jasa di daerah, diketahui terdapat titik rawan, antara lain pada kelembagaan ULP yang tidak independen, pokja ULP tidak permanen, pelaksanaan PBJ yang tidak transparan, benturan kepentingan dalam pelaksanaan PBJ, dan lainnya. Pemda didorong untuk menyusun aksi perbaikan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pembentukan UKPBJ yang independen, perencanaan kegiatan PBJ secara transparan dan akuntabel, melakukan *review* HPS dan *probity* audit, dan lainnya. Perizinan menjadi salah satu fokus karena merupakan sektor yang terkait dengan pelayanan publik, melalui perbaikan sektor perizinan diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, pengawasan menjadi aspek krusial dalam implementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi merupakan tugas penting yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). MCP adalah tolak ukur keseriusan pemerintah daerah dalam upaya mencegah korupsi dikarenakan terdapat indikator dan sub-indikator yang harus dipenuhi, utamanya adalah implementasi. Kepala daerah sebagai pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang besar dan diharapkan dapat menjadi contoh serta tauladan dalam perilaku kehidupannya. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemda merupakan sumber kekuatan utama dalam pengelolaan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik korupsi.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3908476, 3902466, FAKSIMILE (021) 3902449

B. Tema Simposium/Bimtek

Dalam Simposium Nasional/Bimtek dua hari ini dengan mengambil tema “**Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan (Good Governance) UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PMK No. 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan, UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres No. 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)**”, yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. BPPK PPSDM bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK serta *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, dengan tujuan mewujudkan sinergitas dalam pengawasan keuangan dan pencegahan korupsi dalam mencapai tujuan Negara.

C. Waktu dan Tempat

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu s.d Kamis, 06 – 07 Desember 2023

Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 – 14.45 WIB (selesai)

Tempat : **Pullman Hotel and Resorts (Grand on Thamrin Ballroom)**

Jl. M.H.Thamrin No. 59, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350

Agenda : Terlampir

Dress Code : Hari pertama pakaian batik dan wanita menyesuaikan
hari kedua pakaian formal

D. Peserta dan Biaya

Demi sukseskan kegiatan ini, setiap peserta Simposium Nasional/Bimtek membayar kontribusi sebesar **Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi hotel, ruang *meeting*, *coffee break*, perlengkapan simposium, narasumber, dokumentasi kegiatan, penggandaan materi, dan konsumsi selama acara.

Kontribusi kegiatan dapat ditransfer ke **Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No: 0416-01-006809-53-8 Bendahara Panitia BPPK PPSDM - ACFE a.n Sumiati SE Kantor Cabang Jakarta Artha Gading**. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran kontribusi peserta di tempat registrasi dan pengisian daftar hadir/absensi peserta. Sesuai yang telah disepakati bersama pembayaran hanya dapat dilakukan dengan sistem transaksi non-tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Jenderal – BPPK PPSDM**

Drs. Bagas Indayatmo, Ak, M.M HP 0811185587

Ardiyanti Sukmana, SE, M.Sc HP 0811115565 / 0811179579 (Whatsapp)

Eko Sri Pamungkas, Ak, MBA HP 0811233737

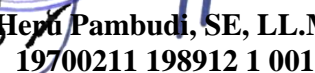
Biro SDM dan Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Fax. 021 – 3902449 / 021 - 7207649

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN**


Andin Hadiyanto, SE, MA, Ph.D
19650609 199012 1 001


SEKRETARIS JENDERAL
selaku
Ketua Panitia Simposium Nasional/Bimtek


Heri Pambudi, SE, LL.M
19700211 198912 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3908476, 3902466, FAKSIMILE (021) 3902449

JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK BPPK PPSDM - ACFE

Sesi I Rabu, 06 Desember 2023
Pullman Hotel and Resorts (Grand on Thamrin Ballroom)
Jl. M.H.Thamrin No. 59, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350

Tema : “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan (*Good Governance*) UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, PMK No. 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan, UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Penerima Tamu	Pullman Hotel and Resorts (Grand on Thamrin Ballroom)
09.00 – 09.15	Pembukaan Simposium/Bimtek	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Jenderal	Heru Pambudi, SE, LL.M	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembukaan Simposium/Bimtek	Menteri Keuangan Sri Mulyani, SE, M.Sc, Ph.D	
09.40 – 09.55	<i>C O F F E E B R E A K</i>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD: Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH (Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan) 2. Perspektif UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien: Dr. (HC) Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A.K (Menteri PPN/Bappenas RI) 3. Perspektif Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah: Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si (Dirjen Bina Keuangan Daerah) 4. Perspektif UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi integritas tangguh untuk mengawal pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel: Alexander Marwata, Ak, SH, CFE (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) 5. Perspektif mengawasi prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas: Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH, MH (Guru Besar Hukum Keuangan Pemerintahan Daerah Universitas Padjadjaran)	Moderator: Pengamat Pemerintahan Daerah Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Selesai		



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

GEDUNG JUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3908476, 3902466, FAKSIMILE (021) 3902449

JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK KERJASAMA BPPK PPSDM – ACFE

Sesi II Kamis, 07 Desember 2023
Pullman Hotel and Resorts (Grand on Thamrin Ballroom)
Jl. M.H.Thamrin No. 59, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350

Tema : “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan (*Good Governance*)” UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, PMK No. 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan, UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penerima Tamu	Pullman Hotel and Resorts (Grand on Thamrin Ballroom)
09.00 – 09.15	Pembukaan Simposium/Bimtek	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Jenderal	Heru Pambudi, SE, LL.M	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembukaan Simposium/Bimtek	Kepala BPPK Kemenkeu RI Andin Hadiyahanto, SE, MA, Ph.D	
09.40 – 09.55	<i>COFFEE BREAK</i>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Abdullah Azwar Anas, S.Pd, SS, M.Si (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) 2. Perspektif PP No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda : Nanik Purwanti, SH, M.Pol.Adm (Deputi Bid. Administrasi Aparatur Sekretariat Negara) 3. Perspektif UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Achmad Idrus (Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan) 4. Perspektif UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara: Dr. M. Yusuf Ateh, Ak, M.BA (Kepala BPKP) 5. Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik: Mokhammad Najih, SH, M.Hum, Ph.D (Ketua Ombudsman RI)	Moderator: Pengamat Pemerintahan Daerah Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH	
12.45 – 13.45	<i>BREAK</i>		
13.45 – 14.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
14.30 – 14.45	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak BPPK PPSDM – ACFE	
14.45	Pemberian Sertifikat	Pihak BPPK PPSDM – ACFE	

Catatan : *Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan* (Tentatif)
Penyelenggaraan simposium nasional/bimtek mengacu pada aturan dan perundang-undangan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

GEDUNG SUDONO PURWODIHARDJO LANTAI 1, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99,
KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110, TELEPON (021) 7207646 DAN (021) 7221567,
FAKSIMILE (021) 7207649

FORMULIR PENDAFTARAN SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK

**“Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Transparan (*Good Governance*)”**

06 – 07 Desember 2023

Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** untuk menjadi peserta Simposium Nasional/Bimtek dua hari kerjasama BPPK PPSDM – ACFE.

.....2023

Peserta,

.....

1. Pendaftaran peserta dan konfirmasi pembayaran paling lambat hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sebelum pelaksanaan kegiatan Simposium Nasional/Bimtek.
2. Formulir pendaftaran dan bukti transfer biaya peserta diharapkan dapat dikirim melalui whatsapp/email untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
3. Panitia tidak melayani dan menerima peserta Simposium Nasional/Bimtek yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta.
4. Surat pengantar *invoice*/kwitansi asli bercap dan bermaterai diserahkan panitia bendahara di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi
Panitia Simposium Nasional/Bimtek

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SDM**

Gedung Sudono Purwodiharjo Lantai 1, Jalan Purnawarman Nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telepon (021) 7207646 – 7221567 Faksimile (021) 7207649

Email: bppk.ppsdm@gmail.com

Drs. Bagas Indayatmo, Ak, MM HP 0811185587

Ardiyanti Sukmana, SE, M.Sc HP 0811115565 / 0811179579 (Whatsapp)

Eko Sri Pamungkas, Ak, MBA HP 0811233737





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

GEDUNG SUDONO PURWODIHARDJO LANTAI 1, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN 12110, TELEPON (021) 7207646 DAN (021) 7221567, FAKSIMILE (021) 7207649

**KWITANSI
RECEIPT**

No. _____ : S-19/SIMNAS/PP.3/2023
Number

Telah terima dari : Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Received From

Sejumlah uang : _____
Amount received

Untuk pembayaran: () Peserta Simposium Nasional/Bimtek dua hari dengan biaya kontribusi
In payment of setiap peserta Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) pada hari Rabu s.d Kamis
Tanggal 06 – 07 Desember 2023 di Pullman Hotel and Resorts (Grand on
Thamrin Ballroom) Tema “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan
Transparan (Good Governance)” UU No.1 Tahun 2022 Tentang HKPD, PMK No.
62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akutansi dan Pelaporan Keuangan, UU No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jumlah Rp. _____

Catatan :

- Kontribusi peserta kegiatan ditransfer ke rekening
Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Artha Gading
A/C 0416-01-006809-53-8
a.n Sumiati SE
Bendahara Panitia BPPK PPSDM – ACFE
- Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui whatsapp/email



Jakarta, 09 November 2023
Sri Dewi Gayatri, SE, MM
Kepala Subbagian Keuangan